



DINAS KETAHANAN PANGAN

RENCANA KERJA
RENJA

2024
SOST



FOOD SECURITY



KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 mempunyai arti strategis karena merupakan Rencana Kerja Tahun Pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bolaang Mongondow 2023–2026.

Dokumen Renja Perangkat Daerah Renja Merupakan Acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2024 yang diramu berdasarkan Renstra DKP tahun 2023-2026 dengan tujuan mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka dalam proses penyusunan hingga penetapan dokumen Renja ini mengikuti sistematika sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam penyusunan Renja ini tentunya masih banyak kekurangan maupun kesalahan, sehingga kami berharap adanya saran, kritik dan masukan yang bersifat konstruktif guna menyempurnakan penyusunan Renja di waktu mendatang, kami tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak atas bantuannya sehingga Renja ini dapat terselesaikan. Semoga bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan

Lolak, Juli 2023

**Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Bolaang Mongondow**



I Wayan Mudiyasa, S.Pd, M.MPd

Pembina Utama Muda

NIP. 196791217 199802 1 001

DAFTAR ISI

	BAB/HAL
KATA PENGANTAR	/i
DAFTAR ISI.....	/ii
DAFTAR TABEL/	/iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	/1
1.2. Landasan Hukum.....	/3
1.3. Maksud dan Tujuan	/5
1.4. Sistematika Penulisan.....	/6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	/9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	/22
2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	/25
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	/26
2.5. Penelaahan Usulan program dan Kegiatan Masyarakat.....	/33
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	/35
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	/37
3.3. Program dan Kegiatan	/37
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	/42
BAB V PENUTUP	/47

DAFTAR TABEL

NOMOR	NAMA TABEL	BAB/HAL
2.1.	Anggaran Program dan Kegiatan DKP Tahun 2021	/10
2.2.	Evaluasi Kinerja program dan Kegiatan Serta Sub Kegiatan Tahun 2021	/12
2.3.	T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DKP dan Pencapaian Renstra DKP s/d Tahun 2021.....	/16
2.4.	Pencapaian Kinerja Pelayanan DKP Kabupaten Bolaang Mongondow.....	/22
2.5.	Realisasi Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah Tahun 2021.....	/ 24
2.6.	T-C 31 review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023.....	/27
2.7.	Usulan Program dan kegiatan Dari Pemangku Kepentingan tahun 2022 Kabupaten Bolaang Mongondow	/34
3.1.	Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Renstra Badan Ketahanan Pangan Nasional Tahun 2023-2024.....	/35
3.2.	Tema Pembangunan dan Prioritas Daerah Tahun 2023.....	/36
3.3.	Tujuan dan Sasaran DKP 2023-2026	/37
3.4.	T-C. 33 Rumusan Rencana Program Kegiatan Sub Kegiatan dan Perkiraan Maju tahun 2024 DKP Kab. Bolaang Mongondow Tahun 2023.....	/38
4.1	program dan Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah Tahun 2023.....	/43

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja Dinas Ketahanan pangan mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

- a. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) DKP sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
- b. Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2024
- c. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2024

Mengingat arti strategis dokumen Renja Perangkat Daerah dalam

mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 yang berfungsi menerjemahkan, mengoperasionalkan RKPD ke dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program RKPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra DKP mengacu pada RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow. Rencana Kerja DKP Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan bidang perencanaan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 tahun ke depan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada.

Sebagai Perangkat Daerah yang mendukung Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow di bidang ketahanan pangan mempunyai tugas yang sangat strategis antara lain, perumusan kebijakan teknis di bidang panganekaragaman dan konsumsi pangan, ketersediaan dan cadangan pangan, distribusi pangan, dan bidang kewaspadaan. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam memantapkan programnya tentang kebijakan teknis urusan ketahanan pangan akan tepat sasaran guna menunjang perkembangan dan kemajuan Kabupaten Bolaang Mongondow.

Dokumen Renja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024 mengacu pada Renstra Dinas Ketahanan Pangan periode 2023– 2026. Disamping itu, Renja Dinas Ketahanan Pangan harus terintegrasi dengan prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2024, bersinergi dengan prioritas pembangunan nasional, dan provinsi Sulawesi Utara serta Agenda Nawacita sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dilingkup Dinas Ketahanan Pangan.

Sebagai tindak lanjutnya, selaras dengan Pasal 7 UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang mewajibkan agar setiap PD untuk menyusun dan memiliki Renja PD dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) PD dan RKPD, yang diajukan sebagai dasar penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Berlatar belakang amanat dimaksud, maka Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai PD Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, melaksanakan segenap proses penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024.

I.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Bolaang Mongondow Tahun 2024 adalah :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Sistem Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

- f. Peraturan Pemrintah Nomo 09 tahun 2010 Tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Bolaang Mongondow dari Kota Kotamobagu ke Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- j. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
- k. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah;
- m. Peraturan Bupati nomor 49 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A Kabupaten Bolaang Mongondow;

- n. Peraturan Bupati Nomor 19 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 Kabupaten Bolaang Mongondow (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 19 Tahun 2022);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor ... Tahun 2022 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023;
- p. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor ..tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2023

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2024 adalah menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja DKP Kabupaten Bolaang Mongondow dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow adalah guna merumuskan program dan kegiatan Pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya DKP Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2024.

I.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN, Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja perangkat daerah yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DKP TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra PD,

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2022 (n-1) serta pencapaian tahun berjalan tahun 2023 (n) dan perkiraan capaian target tahun 2024 (n+1), mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah,

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah,

Berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/internasional (seperti NSPK, SPM, dan SDGs);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkat pelayanan perengkat daerah; dan

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD,

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat dirancangan awal RKPD atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat,

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan dan kabupaten.

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Bagian ini berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, Bagian ini mengemukakan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat

Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan, Bagian ini berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH,

Bagian ini berisikan tentang program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

BAB V PENUTUP, pada bagian ini dikeumukakan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya program dan kegiatan, maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, dan kaidah - kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2022 DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis DKP. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) DKP Kabupaten Bolaang Mongondow ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh DKP Kabupaten Bolaang Mongondow selama tahun 2022 (n-1), serta pencapaian tahun berjalan tahun 2023 (n) dan perkiraan capaian target tahun 2024 (n+1).

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja DKP Kabupaten Bolaang Mongondow ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah serta hambatan dan permasalahan yang terjadi. Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Pada Tahun 2022, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow menerima anggaran sebesar Rp. **6.385.290.434,-** yang dialokasikan untuk pelaksanaan 4 Program dan 10 Kegiatan. Dari jumlah

dana tersebut terealisasi sebesar Rp. **6.030.661.502,-** dengan capaian realisasi keuangan sebesar **94,45 %** dengan capaian kinerja fisik sebesar 100%, Penjelasan yang lebih rinci mengenai realisasi kegiatan beserta indikatornya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1. Anggaran Program dan Kegiatan DKP Tahun 2022

JENIS BELANJA		TAHUN 2021			KET
		ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	
Belanja Daerah Tahun 2022	Belanja Daerah Tahun 2022	6.385.290.434	6.030.661.502	94,45	
	Belanja Operasi Tahun 2022	6.341.158.734	5.986.542.012	94,41	
	Belanja Pegawai	2.316.583.884	2.072.284.748	89,45	
	Belanja Barang dan jasa	4.024.574.850	3.914.257.264	97,26	
	Belanja Modal	44.131.700	44.119.490	99,97	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.131.700	44.119.490	99,97	
	Belanja Modal Aset tetap lainnya	-	-	-	
No	PROGRAM/KEGIATAN	REALISASI (Rp)	REALISASI (Rp)	%	KET
1	2	3	4	5	6
1	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	2.773.956.524	2.523.535.599	91	
	Administrasi Keuangan Perangkat 1 Daerah	2.388.302.844	2.143.835.213	89,76	
	Administrasi Umum Perangkat 2 Daerah	201.761.920	201.426.364	99,83	
	Pengadaan Barang Milik Daerah 3 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	44.131.700	44.119.490	99,97	
	Penyediaan jasa Penunjang Urusan 4 Pemerintahan Daerah	2.654.100	2.654.100	100	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	137.047.640	131.500.432	96	
2	<i>Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat</i>	3.536.650.980	3.434.669.923	97,11	

	Penyediaan dan Penyaluran pangan Pokok atau pangan lainnya sesuaio dengan kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota	3.389.883.520	3.292.685.600	97	
2	Penentuan Harga minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	23.512.620	23.353.220	99.32	
3	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Per kapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	123.254.840	118.631.103	96.25	
3	<i>Program Penanganan Kerawanan pangan</i>	13.593.450	11.886.000	87,44	
	Penyusunan Peta Kerawanan pangan	13.593.450	11.886.000	87,44	
4	<i>Program Pengawasan Keamanan Pangan</i>	61.089.480	60.569.980	99.15	
1	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan segar daerah/Kabupaten	61.089.480	60.569.980	99.15	

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2024 didasarkan pada Renstra DKP tahun 2023-2026, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan DKP;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambiluntuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Berikut evaluasi kinerja program dan kegiatan serta sub kegiatan disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 2.2. Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan Serta Sub Kegiatan
Tahun 2022**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan		Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			
		Indikator	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Capaian Layanan Administrasi dan Sarana dan Prasarana Perkantoran	100 Persen	98 Persen	98	
1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	100	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23	23		
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Laporan	12 Laporan		
Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 laporan	10 laporan		
2 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	100	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	3 Laporan	75	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasui SKPD	Jumlah Laporan Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	36 Laporan	35 Laporan	97	
3 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan (Unit)	4 Unit	4 Unit	100	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Mesin yang diadakan	4 Unit	4 Unit	100	
4 Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100	

	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	2 Laporan	100
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	14 Unit	10 Unit	71
	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	Jumlah kendaraan operasional yang dirawat (Unit)	7 Unit	6 Unit	86
	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	6 Unit	5 Unit	83
	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan yang dipelihara</i>	1 Unit	1 Unit	100
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi (PPH)	89,9	90,7	101
1	Penyediaan dan Penyaluran pangan Pokok atau pangan lainnya sesuaio dengan kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan yang memiliki lembaga toko tani	33,33 Persen	30 Persen	90
	<i>Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan</i>	<i>Tersedianya informasi harga dan Neraca bahan Makanan</i>	1	1	100
	<i>Penyediaan Pangan Berbasis Sumber daya local</i>	<i>Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia</i>	1	1	100
	<i>Pemantauan Stok, Pasokan Harga Pangan</i>	<i>Jumlah Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan</i>	12	12	100
	<i>Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia</i>	<i>Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan</i>	3	1	33
2	Penentuan Harga minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Dokumen penyusunan kebijakan harga minimum daerah.Provinsi	1	1	100
	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal</i>	<i>Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal</i>	1	1	100

3	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Per kapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Dokumen kebijakan Target Konsumsi Pangan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	<i>Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal</i>	<i>Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal</i>	1 Laporan	1 Laporan	100
	Program Penanganan Kerawanan pangan	Percentase Penanganan Kerawanan Pangan	50 Persen	50 Persen	100
1	Penyusunan Peta Kerawanan pangan	Jumlah buku peta rawan pangan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	<i>Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan Pangan</i>	<i>Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Percentase pangan segar asal tumbuhan yang lolos uji keamanannya di laboratorium	100 Persen	100 Persen	100
1	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan segar daerah/Kabupaten	Jumlah sertifikasi, registrasi dan rekomendasi keamanan pangan	3 Dokumen	3 Dokumen	100
	<i>Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota</i>	3	3	100

- a. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan adalah adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja sehingga target kinerja dapat dicapai sesuai harapan, koordinasi dan pemahaman tugas sangat perlu guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia.
- b. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran pangan Pokok atau pangan lainnya sesuaio dengan kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota pada sub kegiatan Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia tidak mencapai target karena minimnya anggaran pada sub kegiatan tersebut.

Adapun kesimpulan dari evaluasi kinerja program. Kegiatan dan sub kegiatan pada tabel diatas adalah sebagai berikut :

1. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolang Mongondow berdampak positif bagi kelancaran kinerja SKPD
2. Program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra DKP Kabupaten Bolang Mongondow berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan perangkat daerah;
3. Tidak tercapainya target kinerja program berimplikasi terhadap target kinerja sasaran dan kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Langkah dan Kebijakan yang harus dilakukan untuk dapat memenuhi target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolang Mongondow, Adanya pengawasan dalam setiap tahapan pekerjaan untuk mengetahui apakah kegiatan telah sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku agar sasaran kegiatan sesuai dengan target yang ingin dicapai, serta Kerjasama dengan pihak terkait dan stakeholder yang berkompeten dalam urusan pangan daerah guna peningkatan kinerja serta keberhasilan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow sesuai dengan Target Renstra yang disajikan pada tabel rekapitulasi dibawah ini.

Tabel 2.3. T - C.29. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DKP dan Pencapaian Renstra DKP s/dTahun 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatans/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun Tahun 2022			Target Kinerja Renja tahun 2023	Perkiraan realisasi Capaian target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun 2023	
					Target Kinerja renja tahun 2022	Realisasi Kinerja renja tahun 2022	Tingkat Realisasi(%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s.d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN									
2.09.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggara an urusan Pemerintah Daerah	98	88,06	100 Persen	98 Persen	98	100%	-	-
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100	100	100	100	100	100	-	-
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	14	14			100		-	-
2.09.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN	Waktu pelayanan administrasi perkantoran (Bulan)	12	12			100	12	-	-
2.09.01.2.02.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	10 laporan	10 laporan				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatans/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Tahun 2022			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Tahun 2023	Perkiraan realisasi Capaian target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun 2022	
					Target Kinerja renja tahun 2022	Target Kinerja renja tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s.d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.09.01.2.03	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6	6	8	8	100			
2.09.01.2.03 .10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan, Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	-	-	2 Dokuemn	2 Dokumen	100	100		
2.09.01.2.03 .11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (Lembar)	8000	6500	-	-	-	-		
2.09.01.2.06. 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	31	31	4 Laporan	3 Laporan	75	90	-	-
2.09.01.2.06. 09	Penyelenggaran Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah (Kali)	30	28	36 Laporan	35 Laporan	97	30	-	-
2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan (Unit)	3	3	4 Unit	4 Unit	100	3	-	-
2.09.01.2.07. 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Mesin yang diadakan	3	3	4 Unit	4 Unit	100	3	-	-
2.09.01.2.08	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Penunjang Pemerintahan Daerah	2	2	2 Dokumen	2 Dokumen	100	5	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatans/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Tahun 2022			Target Kinerja Renja tahun 2023	Perkiraan realisasi Capaian target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun 2022	
					Target Kinerja renja tahun 2022	Realisasi Kinerja renja tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s.d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi TargetRenstra (%)
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa sumber air dan listrik	-	-	12	12	100	100	-	-
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	17	14	14 Unit	10 Unit	71	90	-	-
2.09.01.2.09.01	Penyediaan jasa pememeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan operasional yang dirawat (Unit)	8	6	7 Unit	6 Unit	86	10 Unit	-	-
2.09.01.2.09.06	Pememeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah perlengkapan dan perlengkapan gedung kantor yang dirawat (Unit)	8	6	6 Unit	5 Unit	83	10 Unit	-	-
2.09.01.2.09.09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Waktu pemeliharaan gedung kantor (Tahun)	1	1	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatans/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Tahun 2022			Target Kinerja Renja tahun 2023	Perkiraan realisasi Capaian target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun 2022	
					Target Kinerja renja tahun 2022	Realisasi Kinerja renja tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s.d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi TargetRenstra (%)
2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi (PPH)	89,9	90,7	89,9	90,7	89,9	89	-	-
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Percentase Kecamatan yang memiliki lembaga toko tani	33	30	33	30	90	46,6	-	-
2.09.03.2.01.01	Penyediaan informasi harga pangan dan neraca bahan makanan	Tersedianya informasi harga dan Neraca bahan Makanan	1	1	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1	-	-
2.09.03.2.01.02	Penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	3	3	1 Laporan	1 Laporan	100	3	-	-
2.09.03.2.01.04	Pemantauan stok, pasokan dan harga pangan	Jumlah Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	52	35	12 Laporan	12 Laporan	100	12	-	-
2.09.03.2.01.06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	2	2	3	1	33	3	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatans/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Tahun 2022			Target Kinerja Renja tahun 2023	Perkiraan realisasi Capaian target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun 2022	
					Target Kinerja renja tahun 2022	Realisasi Kinerja renja tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s.d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi TargetRenstra (%)
2.09.03.2 .03	Penentuan Harga minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Dokumen penyusunan kebijakan harga minimum daerah.Provinsi	1	0	-	-	0	1	-	-
2.09.03.2.0 3.01	Koordinasi dan sinkronisasi penentuan harga minimum pangan pokok lokal	Jumlah rapat koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	1	0	-	-	0	1	-	-
2.09.03.2.0 4	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Per kapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Dokumen kebijakan Target Konsumsi Pangan	1	1			100	1	-	-
2.09.03.2.0 4.02	Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Dokumen kebijakan Target Konsumsi Pangan	11	7	1 Laporan	1 Laporan	100	1	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatans/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Tahun 2022			Target Kinerja Renja tahun 2023	Perkiraan realisasi Capaian target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun 2022	
					Target Kinerja renja tahun 2022	Realisasi Kinerja renja tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s.d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi TargetRenstra (%)
2.09.04	Program Penanganan Kerawanan pangan	Percentase Penanganan Kerawanan Pangan	100	100	50 Persen	50 Persen	100	100	-	-
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerawanan pangan	Jumlah buku peta rawan pangan	1	1	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1	-	-
2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan (Dokumen)	1	1	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1		
2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Percentase pangan segar asal tumbuhan yang lolos uji keamanannya di laboratorium	100	98	100	100	100	100	-	-
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan segar daerah/Kabupaten	Jumlah sertifikasi, registrasi dan rekomendasi keamanan pangan	3	3	3	3	100	5	-	-
2.09.05.2.01.05	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1	1	3	3	100	5	-	-

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH (DINAS KETAHANAN PANGAN)

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 dan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 – 2026, Analisis kinerja Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan target Renja DKP tahun 2024 bisa dikatakan cukup baik karena adanya pencapaian indikator target program, kegiatan serta sub kegiatan.

Keberhasilan Indikator kinerja yang dilaksanakan merupakan hal yang bersifat dinamis karena akan tergantung pada perkembangan kondisi, peraturan, anggaran, kebijakan dan lain-lain. Pencapaian terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan akan memberikan gambaran tentang sejauh mana organisasi dapat mencapai kinerjanya sesuai dengan tugas, peran dan fungsi yang diemban.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (PD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow s/d Tahun 2022 (tahun berjalan) adalah sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.4 T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
1	Ratio Ketersediaan Pangan Daerah	-	-	1,15	1,21	1,02	1,08	1,03	1,16	1,16	1,14	Realisasi pada tahun 2023 melebihi target sehingga terjadi perubahan target pada renja tahun 2024
2	Nilai SAKIP Organisasi Perangkat Daerah	-	-	-	100	95	95,50	-	92,5	95	95,50	-

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa indikator kinerja Rasio Pangan Daerah pada tahun 2023 yang melebihi target dengan capaian 1,16 skala atau 113 % berpengaruh terhadap penetapan target rencana kinerja pada tahun 2024 yaitu 1,16 .

Peningkatan capaian realisasi Rasio Pangan Daerah pada tahun 2023 yang melebihi target disebabkan oleh adanya peningkatan jumlah ketersediaan pangan melalui Cadangan Pangan Pemerintah daerah (CPPD), Pengisian Lumbung Pangan Desa serta Bantuan Pangan dari Pemerintah Pusat yang mengakibatkan kenaikan jumlah ketersediaan pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2024

Tabel 2.5.
Realisasi Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah Tahun 2022

No	Uraian Tujuan/Sasaran/OutCome/ Out Put	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
I	Tujuan . . : Meningkatkan Ketersediaan Kalori Perkapita Perhari	Kalori/Hari Perkapita	1849,75	1849,75	100
II	Sasaran : Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Ratio	1,02	1,16	113
	IKK Out Come : Presentase Jumlah Cadangan Pangan Ketersediaan Pangan (Tersedianya Pangan Beras/Jagung sesuai kebutuhan	Angka	100	90	357,14
	IKK Out Put : ▪ Tersedianya Infrastruktur Pergudangan dan Sarana Pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Unit	3 Unit	0	0
	▪ Tersalurnya pangan pokok dan pangan lainnya	Angka	15 Ton	15 Ton	100
	▪ Tersedianya Regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	▪ Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Angka	30 KWT	7 KWT	23
	▪ Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	▪ Tertanganinya kerawanan pangan	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	▪ Tersalurkanya cadangan pangan pada Daerah rentan rawan pangan	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	▪ Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100

Berdasarkan Tabel Indikator Kinerja Kunci diatas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 capaian indikator kinerja kunci Out came berada pada angka 357,14 hal ini disebabkan oleh adanya dana alokasi khusus (DAK) pengisian lumbung pangan serta pengisian ATM beras yang mampu mendongkrak adanya ketersediaan cadangan pangan. sedangkan untuk infrastruktur pergudangan pada tahun tersebut belum dapat direalisasikan oleh karena regulasi terkait gudang cadangan beras untuk Kabupaten Bolaang Mongondow belum ada.

2.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KETAHANAN PANGAN

2.3.1. Tingkat Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

Dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Ketahanan Pangan kedepan untuk menghadapi dinamika yang terjadi saat ini, maka perlu dilakukan langkah-langkah kongkrit yang berkaitan dengan tujuan serta visi dan misi dinas Ketahanan Pangan berdasarkan Renstra 2023-2026

Dinamika perubahan peraturan yang strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow. Berikut ini beberapa permasalahan yang berpengaruh terhadap kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow, meliputi:

- a. Regulasi terkait Sarana dan Prasarana terkait Pergudangan khusunya untuk cadangan pangan pemerintah daerah belum ada
- b. Singkronisasi Program anggaran dari pusat, provinsi hingga kedaerah yang belum berjalan dengan baik
- c. Peralihan lembaga yang menangani ketahanan pangan pusat dari Kementerian Pertanian ke Badan Pangan Nasional yang menyebabkan pelayanan yang belum maksimal diakibatkan oleh perubahan peraturan pada masa peralihan tersebut.
- d. Belum Beragamnya Konsumsi pangan Masyarakat sehingga ketergantungan akan pangan khususnya berasa sangat tinggi

- e. Akses terkait infrastruktur yang mengakibatkan masih adanya daerah rawan-rentan terhadap pangan
- f. Harga Bahan pangan strategis masih berfluktuatif seperti beras, cabe, bawang merah dan bawang putih.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan/Hambatan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolang Mongondow bertujuan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang diharapkan dapat menurunkan tingkat kemiskinan yang ditopang oleh peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi yang menjadi urusan pangan. Namun untuk mencapai hal tersebut, tentunya ada permasalahan permasalahan yang perlu diatasi guna menghadapi Dinamika perubahan lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow. Berikut ini beberapa permasalahan yang berpengaruh terhadap kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow, meliputi:

**Tabel. 2.3.2
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow**

NO.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Ketersediaan Pangan Belum memenuhi standar kebutuhan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketersediaan Pangan dalam pemenuhan cadangan pangan daerah belum maksimal 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sarana dan Prasarana yang kurang memadai ▪ Resiko bencana alam yang mengakibatkan cadangan pangan masih mengharapkan bantuan dari luar ▪ Stabilisasi ketahanan pangan masyarakat belum Seimbang ▪ Fluktuasi harga yang tidak stabil Permainan harga pasar oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ▪ Aturan dan regulasi daerah tentang pengendalian inflasi
		Belum Optimalnya Angka Kecukupan Gizi di Kabupaten Bolaang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prinsip konsumsi pangan yang belum beragam, bergizi seimbang, dan aman. ▪ Masih Rendahnya Pengetahuan

		Mongondow	masyarakat akan penganekaragaman konsumsi pangan pokok lokal pengganti beras
--	--	-----------	--

2.3.3. Dampak Terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah dan Terhadap Capaian Program Nasional

Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2005-2025 menetapkan bahwa visi pembangunan daerah adalah untuk mewujudkan ***"Bolaang Mongondow yang baru, berbudaya, berdaya saing dan mandiri sebagai lumbung pangan indonesia timur"***.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow untuk periode RPD 2023-2026 menetapkan 5 Misi yang akan diwujudkan selama 4 tahun di Kabupaten Bolaang Mongondow. 5 misi tersebut yakni :

1. Mewujudkan Bolaang Mongondow yang berbudaya dan berdaya saing.
2. Mewujudkan pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana Pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
3. Mewujudkan perekonomian daerah yang mandiri bertumpu pada potensi sumberdaya lokal.
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Demokratis dan Bebas KKN.
5. Mewujudkan Bolaang Mongondow Sebagai Lumbung Pangan di Indonesia Bagian Timur.

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow selaku organisasi Perangkat Daerah yang turut berperan mendukung misi ke 5 Penjabat Bupati selaku Kepala Daerah Bolaang Mongondow untuk Mewujudkan Bolaang Mongondow Sebagai Lumbung Pangan di Indonesia Bagian Timur.

Tabel 2.3.3
**Dampak terhadap Visi Misi Kepala Daerah dan
terhadap Capaian Program Nasional**

Visi : Bolaang Mongondow yang baru, berbudaya, berdaya saing dan Mandiri Sebagai Lumbung Pangan Indonesia timur				
No	Misi	Program Kepala Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Misi ke 5. MEWUJUDKAN BOLAANG MONGONDOW SEBAGAI LUMBUNG PANGAN DI INDONESIA BAGIAN TIMUR	Pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow dalam bidang pertanian dan Ketahanan Pangan untuk menjadikan Kabupaten ini sebagai lumbung pangan di Indonesia Bagian Timur.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sarana dan Prasarana terkait Pergudangan yang belum ada ➤ Alih fungsi lahan pertanian yang mengakibatkan rendahnya stok ketersediaan pangan ➤ Belum Beragamnya Konsumsi pangan Masyarakat ➤ Kualitas dan mutu pangan yang belum terjamin ➤ Harga Bahan pangan strategis masih berfluktuatif seperti beras, cabe, bawang merah dan bawang putih. ➤ Masih adanya daerah rawan/rentan terhadap pangan 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Adanya Regulasi Pemerintah Daerah Terkait Sarana dan Prasarana Pergudangan untuk Ketersediaan Pangan ➤ Peraturan Pemerintah Daerah terkait tata ruang wilayah khususnya pertanian ➤ Program Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan pekarangan untuk konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) ➤ Peningkatan pengawasan kualitas dan keamanan pangan yang dikonsumsi ➤ Pelaksanaan Operasi Pasar dan stabilitas harga bahan pangan pokok melalui peraturan kepala daerah ➤ Peningkatan Saran dan Prasarana dalam mengakses daerah yang rentan pangan

2.3.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Dinas Ketahanan Pangan, untuk melihat arah pelaksanaan kegiatan sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan selama satu tahun kedepan

Tabel. 2.3.4
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

No	Sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan	Permasalahan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan	Tantangan	Peluang
	Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Ketersediaan Pangan dalam pemenuhan cadangan pangan daerah belum maksimal	Sarana dan Prasarana yang kurang memadai Resiko bencana	Singkronisasi Program dengan pihak lain terkait penyediaan sarana dan prasarana pendukung
		Kualitas dan mutu pangan yang belum terjamin	Ketergantungan masyarakat terhadap konsumsi pangan beras	Sosialisasi terhadap penganekaragaman konsumsi pangan pokok lokal yang beragam, bergizi, dan seimbang
		Harga Bahan pangan strategis masih berfluktuatif seperti beras, cabe, bawang merah dan bawang putih	Adanya inflasi daerah saat ini	Adanya Tim pengendalian Inflasi Daerah melalui Operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah
		. Masih adanya daerah rawan/rentan terhadap pangan	Peningkatan wilayah yang terdampak kerawanan dan kerentanan pangan berdasarkan Peta Kerawanan Pangan	Adanya Cadangan Pangan Pemerintah daerah dalam mengintervensi wilayah yang terdampak kerawanan pangan

2.3.5. Formula Isu-isu Penting Berupa Rekomendasi dan Catatan yang Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap gambaran pelayanan berdasarkan potensi dan permasalahan pembangunan daerah serta peluang dan tantangan yang dihadapi pada periode sebelumnya, maka perlu perlu dirumuskan isu-isu strategis yang berdampak terhadap pembangunan daerah kabupaten bolaang mongondow khususnya di bidang pangan. Adapun Isu-isu strategis Dinas Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Ketersediaan Pangan Daerah dimana dengan jumlah permintaan pangan semakin meningkat, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, serta pemenuhan kebutuhan bahan baku industri.
2. Meningkatkan pemahaman masyarakat konsumsi pangan yang beragam, bergizi,seimbang dan aman dengan mengoptimalkan Program pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan pokok local yang berkaitan dengan penurunan Stunting
3. Meningkatkan Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan
4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan akses pangan
5. Melaksanaan operasi pasar dan Gerakan pangan murah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pasar dan pengendalian inflasi daerah
6. Melaksanaan diklat, bimbingan teknis, guna Peningkatan kompetensi SDM aparatur Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mogondow
7. Melaksanakan Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani (KWT) dalam memanfaatkan pekarangan guna memenuhi pangan pokok lokal
8. Meningkatkan usaha gabungan kelompok (Gapoktan) tani menjadi Toko Tani Indonesia
9. Melakukan Koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan masyarakat
10. Melakukan Pemetaan wilayah yang rentan dan rawan pangan

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan awal RKPD Dinas Ketahanan Pangan tahun 2024 merupakan dokumen yang disusun guna menjawab isu – isu penting yang dihadapi oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Berdasarkan rancangan awal RKPD Tahun 2024, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow telah melaksanakan 5 (Lima) program berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD Dinas Ketahanan Pangan tahun 2024 dapat dilihat Tabel 2.5. T.C. 31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dibawah ini :

Tabel 2.6. T.C. 31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	DKP	Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah	90 Persen	2.677.727.499	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	DKP	Persentase Capaian Tertib Administrasi Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah	90 Persen	2.677.727.499
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DKP	Percentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	2.276.787.158	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DKP	Percentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	2.276.787.158
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DKP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	2.176.435.985,	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DKP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	2.176.435.985,
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DKP	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	84.960.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DKP	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	84.960.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DKP	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20 Laporan	15.391.173	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DKP	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20 Laporan	15.391.173
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DKP	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atributnya	36 Pasang	21.266.934	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DKP	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atributnya	36 Pasang	21.266.934
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	DKP	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	36 Paket	21.266.934	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	DKP	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	36 Paket	20.812.500

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DKP	Jumlah dokumen pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Dokumen	209.747.500	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DKP	Jumlah dokumen pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Dokumen	209.747.500
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DKP	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	1.584.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DKP	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	1.584.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DKP	Jumlah Laporan fasilitasi Kunjungan tamu	12 laporan	2.497.500	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DKP	Jumlah Laporan fasilitasi Kunjungna tamu	12 laporan	2.497.500
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DKP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi	100 laporan	207.250.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DKP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi	100 laporan	207.250.000
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DKP	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	5 unit	35.624.340	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DKP	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	5 unit	35.624.340
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DKP	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 unit	35.624.340	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DKP	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 unit	35.624.340
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DKP	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	45.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DKP	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	45.000.000
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa penunjang urusan Pemerintahan daerah	4 Laporan	12.150.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa penunjang urusan Pemerintahan daerah	4 Laporan	12.150.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DKP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	12.150.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DKP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	12.150.000
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKP	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	12 Unit	122.151,267	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKP	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	12 Unit	122.151,267
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DKP	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	85.296.867	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	DKP	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	85.296.867

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	DKP	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10 unit	6.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	DKP	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10 unit	6.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	DKP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2 unit	30.854.700	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	DKP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2 unit	30.854.700
II	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	DKP	Percentase Lumbung Pangan Yang memadai berdasarkan Jumlah kecamatan	53,3 %	3.000.124.540	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	DKP	Percentase Capaian Perencanaan, Pengendaliandan Evaluasi Pembangunan Daerah	53,3 %	3.000.124.540
7	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DKP	Jumlah infrakstuktur lumbung pangan yang tersedia	6 Unit	3.000.124.540	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DKP	Jumlah infrakstuktur lumbung pangan yang tersedia	6 Unit	3.000.124.540
	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	DKP	Jumlah infrakstuktur lumbung pangan yang tersedia	4 Unit	710.622.000	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	DKP	Jumlah infrakstuktur lumbung pangan yang tersedia	4 Unit	710.622.000
	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	DKP	Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia	4 Unit	49.410.540	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	DKP	Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia	4 Unit	49.410.540
	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	DKP	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian	4 Unit	2.138.637.000	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	DKP	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian	4 Unit	2.138.637.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	DKP	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	6 Laporan	101.455.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	DKP	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	6 Laporan	101.455.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)
I	2	3	4	5		6	7	8	9	10
III	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	DKP	Skor PPH Konsumsi	90 Skala	391.107.680	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	DKP	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	90 Skala	391.107.680
8	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	DKP	Terwujudnya Stabilitas Harga Bahan Kebutuhan Pokok	60 %	140.222.128	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	DKP	Jumlah Masukan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah yang tersedia	60 %	140.222.128
	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	DKP	Laporan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	1 Dokumen	44.015.874	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	DKP	Laporan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	1 Dokumen	44.015.874
	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	DKP	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	4 Laporan	47.000.000	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	DKP	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	4 Laporan	47.000.000
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	DKP	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	48 Laporan	00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	DKP	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	48 Laporan	00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	DKP	Dokumen Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	48 Laporan	19.229.922	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	DKP	Dokumen Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	48 Laporan	19.229.922
	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	DKP	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	4 Unit	29.976.332	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	DKP	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	4 Unit	29.976.332

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	DKP	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	00	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	DKP	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	00
	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Panga Kabupaten/kota	DKP	Jumlah Kelembagaan Distribusi Panga	4 Unit	00	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	DKP	Jumlah Kelembagaan Distribusi Panga	4 Unit	00
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	DKP	Terpenuhinya Cadangan Pangan Daerah Sesuai Ratio Jumlah Penduduk	30 Ton	00	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	DKP	Terpenuhinya Cadangan Pangan Daerah Sesuai Ratio Jumlah Penduduk	30 Ton	00
	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	DKP	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	12 Dokumen	00	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	DKP	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	12 Dokumen	00
	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	DKP	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	10 Ton	00	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	DKP	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	10 Ton	00
	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	DKP	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	50 Ton	00	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	DKP	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	50 Ton	00
9	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	DKP	Dokumen kebijakan Target Konsumsi Pangan	1 Dokumen	250.885.552	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	DKP	Dokumen kebijakan Target Konsumsi Pangan	1 Dokumen	127.571.045

	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal)	DKP	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	250.885.552	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	DKP	Dikumen Kebijakan Target Konsumsi Pangan	1 Laporan	250.885.552
IV	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	DKP	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	13.565.500	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	DKP	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	13.565.500
10	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	DKP	Jumlah buku peta rawan pangan	1 Buku	9.064.245	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	DKP	Jumlah buku peta rawan pangan	1 Buku	9.064.245
	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	DKP	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1 Buku	9.064.245	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	DKP	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1 Buku	9.064.245
11	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	DKP	Jumlah Desa Yang ditangani	5 Desa	72.309.316	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	DKP	Jumlah Desa Yang ditangani	5 Desa	72.309.316
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	DKP	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	5 Laporan	4.686.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	DKP	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	5 Laporan	4.686.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
V	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	DKP	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang lolos uji keamanannya di laboratorium	100 %	60.624.950	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	DKP	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang lolos uji keamanannya di laboratorium	100 %	60.624.950
12	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	DKP	Jumlah sertifikasi, registrasi dan rekomendasi keamanan pangan	3 Dokumen	60.624.950	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	DKP	Jumlah sertifikasi, registrasi dan rekomendasi keamanan pangan	3 Dokumen	60.624.950
	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	DKP	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	5 Desa	3.014.274,	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	DKP	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal	5 Desa	3.014.274,
	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	DKP	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3.209.046	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	DKP	Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3.209.046
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	DKP	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar	1 Dokumen	49.998.728	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	DKP	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar	1 Dokumen	49.998.728
	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	DKP	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	3 Dokuman	4.402.902	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	DKP	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	3 Dokuman	4.402.902

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (bottom-up planning)

Kajian atas usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mogondow. Untuk tahun 2023 ada usulan program atau kegiatan dari hasil musrenbang kecamatan. Adapun usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, yang disajikan dalam tabel 2.6 berikut.

**Tabel 2.6. Usulan Program dan Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan
Tahun 2023 Kabupaten Bolaang Mongondow.**

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Besaran Volume	CatatanPenting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT <i>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</i>	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow	Skor PPH Konsumsi		
1	Bantuan Bahan Bibit Tanaman Pekarangan dan Alat Pertanian Untuk Kelompok Wanita Tani/KWT	KWT. MIRACLE Desa Nonapan Baru Kecamatan Poigar		1 Kelompok	Usulan Musrenbang
2	Bantuan Bahan Bibit Tanaman Pekarangan dan Suku cadang Alat Pertanian Untuk Kelompok Wanita Tani/KWT	KWT. MOTOBATU Desa Konarom Kecamatan Dumoga Tenggara		1 Kelompok	Usulan Musrenbang
3	Bantuan Bahan Bibit Tanaman Pekarangan dan Suku cadang Alat Pertanian Untuk Kelompok Wanita Tani/KWT	KWT Bersatu, Desa Solimandungan II Kecamatan Bolaang		1 Kelompok	Usulan Musrenbang
4	Bantuan Bahan Bibit Tanaman Pekarangan dan Suku cadang Alat Pertanian Untuk Kelompok Wanita Tani/KWT	KWT. Walet jaya Desa Langagon I Kecamatan Bolaang		1 Kelompok	Usulan Musrenbang
5	Bantuan Bahan Bibit Tanaman Pekarangan dan Suku cadang Alat Pertanian Untuk Kelompok Wanita Tani/KWT	KWT. Desa Solimandungan Baru Kecamatan Bolaang		1 Kelompok	Usulan Musrenbang
6	Bantuan Bahan Bibit Tanaman Pekarangan dan Suku cadang Alat Pertanian Untuk Kelompok Wanita Tani/KWT	Kwt Mosobatu Desa Mongkoinit Barat Kec Lolak		1 Kelompok	Usulan Musrenbang
7	Bantuan Bahan Bibit Tanaman Pekarangan dan Suku cadang Alat Pertanian Untuk Kelompok Wanita Tani/KWT	Kwt mandiri desa doloduo ii. Kec dumoga barat		1 Kelompok	Usulan Musrenbang
8	Bantuan Bahan Bibit Tanaman Pekarangan dan Suku cadang Alat Pertanian Untuk Kelompok Wanita Tani/KWT	KWT. MANDIRI Desa Matali Baru Kecamatan Lolayan			Usulan Pokir
9	Bantuan Bahan Bibit Tanaman Pekarangan dan Suku cadang Alat Pertanian Untuk Kelompok Wanita Tani/KWT	KWT MANDIRI DESA DOLODUO II. KEC DUMOGA BARA			Usulan Musrenbang
II	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT <i>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</i>		Skor PPH Konsumsi		
1	Pengisian Lumbung Pangan Desa	Desa Lolak, Kab. Bolaang Mongondow		1 Kelompok	Usulan Pokir
2	Pengisian Lumbung Pangan Desa	Desa kosio, Kab. Bolaang Mongondow		1 Kelompok	Usulan Pokir
3	Pengisian Lumbung Pangan Desa	Kopandakan II, Kecamatan Lolayan, Kab. Bolaang Mongondow		1 Kelompok	Usulan Pokir

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Penyusunan Renja Tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan memperhatikan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam renstra Badan Ketahanan Pangan Nasional Tahun 2020 – 2023 yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mogondow saat ini, adapun kebijakan nasional perencanaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1. Tujuan, sasaran dan indikator Sasaran Renstra Badan Ketahanan Pangan Nasional 2020-2024

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
Meningkatnya Pemantapan Ketahanan Pangan	Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri	Persentase Lembaga Distribusi Pangan Yang Mandiri Yang Melakukan Penjualan Beras kepada Toko Tani Indonesia/TTI (%)
	Penguatan Akses Pangan Masyarakat di Daerah Rawan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)
	Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional	Persentase PSAT Yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan (%)
	Meningkatnya Konsumsi Sayur, Buah, Daging dan Protein Asal Ternak	Konsumsi Sayur dan Buah (gram/kapita/hari) Konsumsi Daging (kg/kapita/hari) Konsumsi Protein Asal Ternak (gram/kapita/hari)
	Terselenggaranya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima	Terwujudnya Birokrasi Badan Ketahanan Pangan Yang Efektif dan Efisien
	Terkelolanya Anggaran Badan Ketahanan Pangan Yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Badan Ketahanan Pangan (nilai)

Adapun kebijakan Pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2. Tema Pembangunan dan Prioritas Daerah Tahun 2023

TEMA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023: “Revitalisasi daya saing melalui penguatan infrastruktur dan sumberdaya manusia serta kualitas lingkungan hidup”.	
Prioritas Daerah	
PRIORITAS 1	Peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan ekonomi
PRIORITAS 2	Peningkatan daya saing investasi daerah
PRIORITAS 3	Penguatan UMKM dan Industri pengolahan
PRIORITAS 4	Pengembangan produk unggulan masyarakat
PRIORITAS 5	Peningkatan kualitas Pendidikan
PRIORITAS 6	Penguatan kelembagaan dan pelayanan perpustakaan yang dikelola oleh masyarakat
PRIORITAS 7	Peningkatan mutu layanan Kesehatan terutamapada pelayanan primer (primary health care)
PRIORITAS 8	Peningkatan sarana prasarana olahraga dalam mendukung Germas dan pemenuhan kebutuhan/cadangan pangan yang bergizi dan seimbang
PRIORITAS 9	Ketersediaan dan distribusi pangan
PRIORITAS 10	Peningkatan pengelolaan sampah dan limbah
PRIORITAS 11	Adaptasi lingkungan dan mitigasi bencana
PRIORITAS 12	Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran

Memperhatikan arah kebijakan Badan Pangan Nasional dan Daerah tahun 2024, secara tidak langsung Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow mendukung prioritas Pembangunan nasional dan provinsi sebagaimana tugas pokok dan fungsi DKP yaitu merumuskan serta melaksanakan urusan pemerintah daerah yang berkaitan dengan bidang pangan.

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024 DKP merupakan penjabaran dari RPD, dan Rencana Kerja Pemerintah, yang memuat rancangan kerangka ekonomi, rencana kerja dan pendanaan, baik dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi Masyarakat.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 adalah perwujudan yang tertuang dalam Rancangan Rencana Strategis DKP Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023-2026, yang disajikan pada tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran DKP 2023-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN
1	2	3	4
1	Meningkatkan Ketersediaan Kalori Perkapita Perhari		Angka Kecukupan Gizi
		Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Rasio Pangan daerah
		Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan pembangunan di bidang ketahanan pangan pada dasarnya adalah menciptakan kondisi terpenuhinya pangan bagi masyarakat yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan.

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan tahun 2024 adalah upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan yang mampu bersaing, tercukupi dengan bertumpu pada sumberdaya pangan lokal yang ada di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow yang dikenal cukup agraris dan meminimalisir ketergantungan pangan dari luar daerah dengan mengoptimalkan potensi wilayah.

Adapun rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran DKP tahun 2024 dapat dilihat pada tabel Tabel 3.4 T-C. 33 berikut:

Tabel 3.4 T-C. 33. Rumusan Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Perkiraan Maju Tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025													
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)											
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target												
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																							
2	09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN										3.269.293.239					5,103,147,437								
2	09	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										2.738.994.479					3,096,927,437								
2	09	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										2.392.723.858					2,376,277,437								
2	09	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Administrasi perkantoran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	36 Orang/bul	100 persen	2.299.889.898,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelayanan Administrasi perkantoran	100 Persen	2,201,277,437									
2	09	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pelayanan Administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran		100 Persen	12 Dokumen	100 persen	76.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelayanan Administrasi perkantoran	100 Persen	150,000,000									
2	09	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pelayanan Administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran		100 Persen	12 Laporan	100 persen	16.033.960	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelayanan Administrasi perkantoran	100 Persen	25,000,000									
2	09	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										00					40,000,000								
2	09	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atributnya		36 Pasang	36 Paket	36 Pasang	00	Penerimaan Pembiayaan		Jumlah Paket Pakaian Dinas Dan Atribut Kelengkapannya	36 Pasang	40,000,000									
2	09	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										154,578,940					263,500,000								
2	09	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Yang tersedia	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Terlaksananya Kegiatan Administrasi umum Perangkat Daerah		100 Persen	12 Dokumen	100 persen	00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Bahan Bacaan Yang tersedia	100 Persen	3,500,000									
2	09	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan fasilitasi Kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Kegiatan Administrasi umum Perangkat Daerah		100 Persen	12 Laporan	100 persen	3.092.460	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan fasilitasi Kunjungnatamu	100 Persen	10,000,000									

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
2	09	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD	Terlaksananya Kegiatan Administrasi umum Perangkat Daerah		100 Persen	100 Laporan	100 persen	207.563.908	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi	100 Persen	250,000,000	
2	09	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								00					75,000,000	
2	09	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan danMesin Lainnya	Tersedianya Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Peralatan danMesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Barang Milik daerah yangTersedia		5 Unit	15 Unit	5 Unit	00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya BarangMilik Daerah	5 Unit	75,000,000	
2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								13.068.636					12,150,000	
2	09	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik yang Disediakan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Laporan			13.068.636	Penerimaan Pembiayaan				12,150,000
2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								122.545.617					330,000,000	
2	09	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan PajakKendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Barang MilikDaerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatanyang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara		10 Unit	2 Unit	5 Unit	85.296.867	Penerimaan Pembiayaan		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	10 Unit	150,000,000	
2	09	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan danMesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang MilikDaerah Terlaksananya	Jumlah Peralatan danMesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara		10 Unit 17 Unit	17 Unit	5 Unit	6.394.050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	10 Unit 17 Unit	30,000,000	
2	09	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atauBangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang MilikDaerah	Jumlah Sarana dan Prasara Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara		10 Unit	1 Unit	5 Unit	30.854.700	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	10 Unit 17 Unit	150,000,000	
2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN								1.300.000.000					626,900,000	
2	09	02	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								1.300.000.000					626,900,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
2	09	02	2.01	01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Tersedianya Infrastruktur Ketahanan Pangan YangMemadai	Jumlah Lumbung Panganya yangTersedia	jumlah infrastuktur Lumbung Pangan yangtersedia		40 Persen	3 Unit	6 Unit	00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya Infrastruktur Ketahanan PanganYang Memadai	40 Persen	300,700,000	
2	09	02	2.01	02	Penyediaan InfrastrukturLantai Jemur	Tersedianya Infrastruktur Ketahanan Pangan YangMemadai	Jumlah Lantai Jemur yangTersedia	jumlah infrastuktur Lumbung Pangan yangtersedia		40 Persen	3 Unit	6 Unit	00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya Infrastruktur Ketahanan PanganYang Memadai	40 Persen	25,500,000	
2	09	02	2.01	03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Tersedianya Infrastruktur Pendukung KemandirianPangan yang Tersedia	Jumlah Infrastruktur Ketahanan Pangan yang tersedia	jumlah infrastuktur Lumbung Pangan yangtersedia		40 Persen	1 Unit	6 Unit	300.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya Infrastruktur Ketahanan PanganYang Memadai	40 Persen	300,700,000	
2	09	02	2.01	04	Koordinasi dan SinkronisasiPenyediaan Infrastruktur Logistik	Tersedianya Infrastruktur Ketahanan Pangan YangMemadai	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangkaPenyediaan Infrastruktur Logistik	jumlah infrastuktur Lumbung Pangan yangtersedia		40 Persen	30 Laporan	6 Unit	00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya Infrastruktur Ketahanan PanganYang Memadai	40 Persen	0	
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT						455.231.180							887,820,000	
2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan HargaPangan						380,446,014							592,320,000	
2	09	03	2.01	01	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Meningkatnya Pola Pangan Harapan Masyarakat	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)			83 Persen	1 Laporan		44.015.874	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Meningkatnya PolaPangan Harapan Masyarakat	83 Persen	46,000,000	
2	09	03	2.01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber DayaLokal	Meningkatnya Pola Pangan Harapan Masyarakat	Pangan Berbasis SumberDaya Lokal yang Tersedia			83 Persen	1 Laporan		113.331.854	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Meningkatnya PolaPangan Harapan Masyarakat	83 Persen	327,000,000	
2	09	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi danPelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Meningkatnya Pola Pangan Harapan Masyarakat	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan PanganLainnya			83 Persen	5 Laporan		00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya PolaPangan Harapan Masyarakat	83 Persen	46,000,000	
2	09	03	2.01	04	Pemantauan Stok, Pasokandan Harga Pangan	Meningkatnya Pola Pangan Harapan Masyarakat	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan			83 Persen	12 Dokumen		17.021.568	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Meningkatnya PolaPangan Harapan Masyarakat	83 Persen	29,000,000	
2	09	03	2.01	06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat danToko Tani Indonesia	Meningkatnya Pola Pangan Harapan Masyarakat	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan			83 Persen	1 Unit		29.976.332	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Meningkatnya PolaPangan Harapan Masyarakat	83 Persen	70,270,000	
2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi						250.885.55							186,000,000	
2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Meningkatnya Pola Pangan Harapan Masyarakat	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengembangaman Konsumsi Pangan BerbasisSumber Daya Lokal	Dikumen Kebijakan TargetKonsumsi Pangan		83 Persen	1 Laporan	1 Dokumen	250.885.55	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya PolaPangan Harapan Masyarakat	83 Persen	186,000,000	
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN						14.442.630							231,500,000	
2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kertenanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan						9.064.245							16,500,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
2	09	04	2.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan KerentananPangan	Terlaksananya Penanganan KerawananPangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yangDimutahirkan	Jumlah Buku Peta RawanPangan		50 Persen	1 Dokume n	1 Buku	9.064.245	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Terlaksananya Penanganan Kerawanan Pangan	50 Persen	16,500,000	
2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota									5.378.385				215,000,000	
2	09	04	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanganan KerawananPangan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Yang ditangani		50 Persen	60 Laporan	3 Desa	4,686,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Terlaksananya Penanganan Kerawanan Pangan	50 Persen	15,000,000	
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN									60.624.950				260,000,000	
2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota									60.624.950				260,000,000	
2	09	05	2.01	03	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Meningkatnya KeamananPangan Daerah	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan SegarAsal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi, Registrasi dan Rekomendasi KeamananPangan		100 Persen	3 Dokume n	5 Dokumen	3.014.274	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Meningkatnya Keamanan PanganDaerah	100 Persen	30,000,000	
2	09	05	2.01	04	Rekomendasi KeamananPangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya KeamananPangan Daerah	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan SegarAsal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi, Registrasi dan Rekomendasi KeamananPangan		100 Persen	3 Dokume n	5 Dokumen	3.209.046	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Meningkatnya Keamanan PanganDaerah	100 Persen	30,000,000	
2	09	05	2.01	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mututan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya KeamananPangan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mututan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi, Registrasi dan Rekomendasi KeamananPangan		100 Persen	3 Dokume n	5 Dokumen	49.998.728	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Meningkatnya Keamanan PanganDaerah	100 Persen	200,000,000	
2	09	05	2.01	0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Meningkatnya Keamanan Pangan Daerah	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan		100%	1 Dokumen	1 Dokumen	4.402.902	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Meningkatnya Keamanan Pangan Daerah	100 Persen	5.000.000	
TOTAL												3.269.293.239,					5,103,147,437		

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja meliputi program dan kegiatan merupakan sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu.

Dengan mengacu pada tujuan, sasaran dan strategi sebagaimana telah ditetapkan dalam Dokumen RPD tahun 2023-2026 dan RKPD tahun 2024 untuk mewujudkan misi ke 5. Yaitu : ***Mewujudkan Bolaang Mongondow Sebagai Lumbung Pangan Di Indonesia Bagian Timur***, berdasarkan pada misi tersebut diatas sasaran organisasi dengan indikator sasaran sebagai tolok ukur keberhasilannya, maka Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow menetapkan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif untuk pelaksanaan program Ketahanan Pangan tahun 2024 yang disajikan pada tabel 4.1 dibawah ini :

Tabel 4.1. Program dan Kegiatan Prioritas Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025							
				Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan											
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN								3.269.293.239				5,103,147,437					
2	09	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2,630,588,667				3,096,927,437					
2	09	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2.392.723.858				2,376,277,437					
2	09	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Administrasi perkantoran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	23 Orang/bulan	100 persen	2.299.889.898	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelayanan Administrasi perkantoran	100 Persen	2,201,277,437			
2	09	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pelayanan Administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran		100 Persen	12 Dokumen	100 persen	76.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelayanan Administrasi perkantoran	100 Persen	150,000,000			
2	09	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pelayanan Administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran		100 Persen	12 Laporan	100 persen	16.033.960	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelayanan Administrasi perkantoran	100 Persen	25,000,000			
2	09	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								210.656.368				263,500,000					
2	09	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan fasilitasi Kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Kegiatan Administrasi umum Perangkat Daerah		100 Persen	100 Laporan	100 persen	3.092.460	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan fasilitasi Kunjungan tamu	100 Persen	10,000,000			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan							
2	09	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD	Terlaksananya Kegiatan Administrasi umum Perangkat Daerah		100 Persen	100 Laporan	100 persen	207.563.908	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi	100 Persen	250,000,000	
2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								13.068.636					12,150,000	
2	09	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik yang Disediakan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Laporan			13.068.636	Penerimaan Pembiayaan				12,150,000
2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								122.545.617					330,000,000	
2	09	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan PajakKendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Barang MilikDaerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatanyang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara		10 Unit	2 Unit	5 Unit	85.296.867	Penerimaan Pembiayaan		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	10 Unit	150,000,000	
2	09	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan danMesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang MilikDaerah Terlaksananya	Jumlah Peralatan danMesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara		10 Unit 17 Unit	17 Unit	5 Unit	6.394.050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	10 Unit 17 Unit	30,000,000	
2	09	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atauBangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang MilikDaerah	Jumlah Sarana dan Prasaranag Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara		10 Unit	1 Unit	5 Unit	30.854.700	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	10 Unit 17 Unit	150,000,000	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025								
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
2	09	03							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target							
2	09	03	2.01		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT									455.231.180				887,820,000				
2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan									204.345.628				592,320,000				
2	09	03	2.01	01	Penyusunan Neraca Bahan Makanan	Meningkatnya Pola Pangan Harapan Masyarakat	Informasi Neraca Bahan Makanan				83 Persen	1 Laporan		44.015.874	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Meningkatnya Pola Pangan Harapan Masyarakat	83 Persen	46,000,000			
2	09	03	2.01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Meningkatnya Pola Pangan Harapan Masyarakat	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia			83 Persen	1 Laporan		113.331.854	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Meningkatnya Pola Pangan Harapan Masyarakat	83 Persen	327,000,000				
2	09	03	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Meningkatnya Pola Pangan Harapan Masyarakat	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan			83 Persen	12 Dokumen		17.021.568	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Meningkatnya Pola Pangan Harapan Masyarakat	83 Persen	29,000,000				
2	09	03	2.01	06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Meningkatnya Pola Pangan Harapan Masyarakat	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan			83 Persen	1 Unit		29.976.332	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Meningkatnya Pola Pangan Harapan Masyarakat	83 Persen	70,270,000				
2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi									250.885.552				186,000,000				
2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangannya Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Meningkatnya Pola Pangan Harapan Masyarakat	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengembangannya Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dikumen Kebijakan Target Konsumsi Pangan		83 Persen	1 Laporan	1 Dokumen	250.885.552	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Pola Pangan Harapan Masyarakat	83 Persen	186,000,000				
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN									14.442.630				231,500,000				
2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan									9.064.245				16,500,000				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	09	04	2.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Terlaksananya Penanganan Kerawanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Jumlah Buku Peta RawanPangan		50 Persen	1 Dokumen	1 Buku	9.064.245	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Terlaksananya Penanganan Kerawanan Pangan	50 Persen	16,500,000
2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota									5.378.385				215,000,000
2	09	04	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanganan Kerawanan Pangan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Yang ditangani		50 Persen	60 Laporan	3 Desa	5.378.385	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Terlaksananya Penanganan Kerawanan Pangan	50 Persen	15,000,000
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN									60.624.950				260,000,000
2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota									60.624.950				260,000,000
2	09	05	2.01	03	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Meningkatnya Keamanan Pangan Daerah	Jumlah Rekomendasi Perizinan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi, Registrasi dan Rekomendasi Keamanan Pangan		100 Persen	3 Dokumen	5 Dokumen	3.014.274	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Meningkatnya Keamanan Pangan Daerah	100 Persen	30,000,000
2	09	05	2.01	04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Keamanan Pangan Daerah	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi, Registrasi dan Rekomendasi Keamanan Pangan		100 Persen	3 Dokumen	5 Dokumen	3.209.046	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Meningkatnya Keamanan Pangan Daerah	100 Persen	30,000,000
2	09	05	2.01	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mututan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Keamanan Pangan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mututan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi, Registrasi dan Rekomendasi Keamanan Pangan		100 Persen	3 Dokumen	5 Dokumen	49.998.728	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Meningkatnya Keamanan Pangan Daerah	100 Persen	200,000,000
					Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Meningkatnya Keamanan Pangan Daerah	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Kelembagaan yang terbentuk		100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.402.902	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Meningkatnya Keamanan Pangan Daerah	100 Persen	10.000.000
TOTAL													3.269.293.239				5,103,147,437	

BAB V P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow, merupakan dokumen perencanaan tahunan yang akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan kinerja selama tahun 2024. Dalam rangka menjamin adanya sinergi perencanaan pembangunan guna menjaga kesinambungan proses perencanaan dan untuk mengefektifkan pencapaian pembangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow secara umum dan Dinas Ketahanan Pangan secara khusus maka Renja Dinas Ketahanan Pangan disusun dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow dan Renstra Dinas Ketahanan Pangan .

Substansi Renja Dinas Ketahanan Pangan disusun dengan berpedoman pada Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan keefektifan pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Substansi Renja Dinas Ketahanan Pangan disusun terukur dan berdasarkan tatalaksana arah kebijakan dalam RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 dan Renstra Dinas Ketahanan Pangan.
2. Tindak lanjut alokasi anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow atas proses penganggaran yang tidak sesuai dengan dokumen Renja Dinas Ketahanan Pangan, maka akan berpengaruh pada tingkat capaian targetan yang telah ditetapkan.
3. Bidang-bidang dan semua unsur teknis pelaksana kerja pada DKP, agar segera menyusun rencana kinerja masing-masing dengan mengacu pada Renja yang telah ditetapkan.

- Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk setiap program dan kegiatan didasarkan pada Renja yang telah ditetapkan dengan menganut prinsip efektifitas dan efisiensi anggaran.

Kinerja Dinas Ketahanan Pangan tahun 2024 secara optimal akan didasarkan pada arah kebijakan dalam Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023-2026, Sehingga berimplikasi terhadap pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Kami berharap, bahwa Renja Dinas Ketahanan Pangan ini dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga seluruh target indikator kinerja yang tertuang dalam RPJMD untuk urusan ketahanan pangan dapat tercapai. Adapun jika terdapat kendala dalam capaian indikator kinerja tersebut, baik diakibatkan masih belum memadainya anggaran dan permasalahan teknis lainnya, dapat dilakukan penajaman dan perbaikan melalui perubahan rencana kerja.

Demikian, dokumen Renja Dinas Ketahanan Pangan ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lolak, Juli 2023
 Kepala Dinas Ketahanan Pangan
 Kab Bolaang Mongondow



I WAYAN MUDIYASA, S.Pd, M.MPd
 NIP.19691217 199802 1001